



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARJONI
2. Jabatan : KEPALA LOKA
3. NHK : 524690

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m2/227 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 335 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 227 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA WAKATOBI, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 100.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU AYL A M Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



3. MOTOR, HONDA F1C02N46L2 A/T - SCOOPY Tahun 2025, HASIL
SENDIRI Rp. 25.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	109.352.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.425.249
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.403.277.249
III. HUTANG	Rp.	276.421.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.126.856.249

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.